

IMPLEMENTASI PROGRAM DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH SMA NEGERI 1 PASANGKAYU KABUPATEN MAMUJU UTARA

Aswar Anas

aswar4nas@gmail.com

Mahasiswa Program Studi Magister Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Tadulako

Abstract

This research aims at knowing and analyzing the implementation of School Operational Assistance Fund at SMAN 1 Pasangkayu of North Mamuju regency. The method used is qualitative, and the informants of the research were determined purposively to who are deemed to understand the problems investigated. The informants are the Head of Education, Culture, Youth and Sports of North Mamuju regency, Head of Section of Secondary Education, the School Committee, students' parents who received the assistance funds, Principal of SMA 1 Pasangkayu. Type of data used are primary data and secondary data. Data collection was done through observation, interview, and documentation. The results shows that communication is one of the main factors in policy implementation, communication becomes a major pathway for the implementation of each program. Human resources are the main factors that should be possessed by any particular institution or unit both government and non government institutions. Vice versa if the perspectives of the implementers are different from the decision makers, the implementation process of a policy becomes increasingly difficult. And in such cases, implementers will use the flexibility and sometimes in subtle ways inhibit, or will benefit each individual in the process of policy implementation.

Keywords: *Communication, Resources, Disposition and Bureaucratic Structure.*

Implementasi program dana bantuan operasional sekolah merupakan tanggung jawab Kepala Daerah, termasuk Kabupaten Mamuju Utara merupakan tanggung jawab kepala daerah yang dalam operasionalisasinya dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Selanjutnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2013 tentang petunjuk teknis pengelolaan dana BOS menyebutkan:

1. Dinas pendidikan kabupaten Mamuju Utara merupakan pengawas pengelolaan dana bantuan operasional sekolah,
2. Sekolah mempunyai tugas melakukan proses penyaluran terhadap implementasi

program dana bantuan operasional sekolah.

3. Dinas Pendidikan dalam pengelolaan dana BOS tingkat SMA melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. melakukan validasi data sekolah
 - b. melakukan monitoring dan evaluasi program BOS SMA di sekolah
 - c. melakukan komfilasi data laporan penggunaan dana BOS SMA baik dari sisi pembelajaran (*expediture*) maupun perolehan (*revenue*).
4. Dinas pendidikan dipimpin oleh kepala dinas, dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administrasi mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Implementasi program dana BOS bermaksud untuk untuk mendukung rintisan

program wajib belajar 12 Tahun yang terjangkau dan bermutu. Sejatinya, program Bantuan Operasional Sekolah bertujuan agar seluruh siswa SMA negeri maupun swasta bebas dari pungutan biaya operasional sekolah, terutama mereka yang berasal dari keluarga miskin. Adapun bagi siswa sekolah swasta, Bantuan Operasional Sekolah diharapkan dapat membantu meringankan beban biaya operasional sekolah. Pembebasan ataupun peringanan biaya operasional sekolah tentunya mutlak perlu dinikmati oleh para pelajar tanpa hambatan prosedural dan kejahatan korupsi. Bila kemacetan penyaluran dana BOS saja bisa sangat mengganggu hak pendidikan para pelajar, apalagi dengan kejahatan penyelewengan dan korupsi. Hal itu sama saja berarti melanggar hak konstitusional para pelajar.

Berdasarkan petunjuk teknis tahun 2015 program dana bantuan operasional sekolah (SMA) Negeri 1 Pasangkayu digunakan sekolah untuk membantu memenuhi kebutuhan biaya operasional non personalia sekolah yang meliputi: Pengadaan alat tulis sekolah; Pengadaan alat habis pakai; Pengadaan bahan habis pakai; Pengadaan buku pelajaran /buku penunjang pelajaran/buku referensi; Pemeliharaan dan Perbaikan Sarana/Prasarana sekolah; Layanan daya dan jasa lainnya; Penyelenggaraan Evaluasi pembelajaran; Penyelenggaraan kegiatan pembinaan siswa /extra siswa dan intra kulikuler; Kegiatan penerimaan siswa baru, Pengembangan propesi guru dan tenaga kependidikan; Penegelolaan data individual sekolah berbasis TIK melalui aplikasi dapodikmen 2015; Pengembangan website sekolah; Biaya asuransi keamanan dan keselamatan sekolah; Penyusunan dan pelaporan; (Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Menengah Atas tahun 2015) edisi Februari 2015.

Tetapi faktanya di SMA negeri 1 Pasangkayu tidak demikian adanya karena

program bantuan operasional sekolah(BOS) tidak melibatkan stakeholder seperti dinas pendidikan, komite sekolah, orang tua siswa, siswa dalam mengawal proses pengelolaan, penyaluran dan pemanfaatan dana tersebut hanya dikelola oleh kepala sekolah dan bendahara sekolah. Sebagaimana dalam teori Edwar III menyebutkan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat unsur, yakni: (1) Komunikasi, (2) Sumber Daya, (3) disposisi, dan (4) Struktur Birokrasi. Keempat variabel ini saling berhubungan satu sama lainnya. Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian, yaitu: Implementasi Program Dana Bantuan Biaya Operasional Sekolah SMA Negeri 1 Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara.

1. Komunikasi yaitu Upaya implementor mengetahui apa yang harus dilakukan dalam mewujudkan Keberhasilan implementasi program Bantuan operasional. Apa yang menjadi tujuan sasaran program harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
2. Sumber Daya Yaitu Sumber-Sumber yang dimaksud adalah: staf yang memiliki keahlian yang baik, dapat mengoperasikan IT, memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) atau juknis, serta memiliki legalitas pelaksana program untuk melaksanakan tugas serta wewenang.
3. Disposisi adalah dukungan terhadap pelaksanaan program pemberian bantuan dana biaya operasional sekolah, berupa pengangkatan birokrat dalam pelaksanaan program dana bantuan operasional sekolah, sehingga praktek pelaksanaan program tidak menjadi bias.
4. Struktur Birokrasi adalah mekanisme kerja dalam sebuah entitas, yang didalamnya terdapat orang-orang dan pembagian tugas masing-masing sesuai standar procedure operating SOP yang ada untuk kesepakatan kolektif dalam memecahkan

masalah pemberian bantuan dana biaya operasional Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pasangkayu di Kabupaten Mamuju Utara.

Bahwa untuk dapat mengimplementasikan kebijakan secara sempurna (*Perfect implementation*) maka diperlukan beberapa persyaratan tertentu, adalah sebagai berikut:

1. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh Badan/Instansi pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan/kendala yang serius.
2. Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai;
3. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia;
4. Kebijakan yang akan diimplementasikan didasari oleh suatu hubungan kuasalitas yang andal;
5. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya;
6. Hubungan saling ketergantungan harus kecil;
7. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan;
8. Tugas-tugas terperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat;
9. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna;
10. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatutan yang sempurna.

Pada dasarnya pemilihan teknik dan model implementasi kebijakan dapat dilihat pada dua jenis pemilihan yaitu pertama adalah implementasi kebijakan yang berpola “dari atas ke bawah” (*top-bottom*) versus dari “Bawah ke atas (*bottom-top*), dan pemilihan implementasi yang berpola paksa (*command-and-control*) dan Mekanisme pasar (*economic incentive*). Riant Nugroho, (2003;163). Dalam rangka memecahkan masalah, ada beberapa tahap penting dari kebijakan publik antara lain yaitu: Penetapan

agenda kebijakan (*agenda setting*), Formulasi kebijakan (*policy formulation*), adopsi kebijakan (*policy adoption*), implementasi kebijakan (*policy implementation*), dan penilaian kebijakan (*policy assessment*),

Pada penelitian ini penekanan adalah Bagaimana Implementasi Program Dana Bantuan Operasional sekolah SMA Negeri 1 Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara. Ada beberapa Variabel yang diteliti berdasarkan model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Edward III meliputi: Indikator Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi.

METODE

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dimana penelitian kualitatif membangun pengetahuan melalui interpretasi terhadap multi perspektif, dari berbagai masukan segenap partisipan yang terlibat di dalam penelitian, tidak hanya dari peneliti semata. sumber datanya bermacam-macam, seperti catatan observasi, catatan wawancara, pengalaman individu dan sejarah.

Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami objek yang diteliti secara mendalam.

Lokasi Penelitian adalah SMA Negeri 1 Pasangkayu kabupaten Mamuju Utara dengan pelaksanaan penelitian dilakukan pada bulan Agustus s/d Nopember 2015. Teknik Penentuan informan dilakukan melalui metode *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2010:96) *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Artinya peneliti dengan sengaja memilih informan yang dianggap mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Pertimbangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah stakeholder pendidikan yang dianggap mampu memberi informasi yang valid tentang mekanisme pengelolaan dan penyaluran dana bantuan operasional sekolah SMA Negeri 1 Pasangkayu kabupaten Mamuju Utara.

Sumber data dari penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama atau secara langsung yang dilakukan melalui wawancara dengan 7 (tujuh) informan atau narasumber. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi referensi maupun dokum terkait Peraturan mengatur tentang penyaluran dana BOS SMA, penelitian terdahulu, studi kepustakaan, internet, jurnal dan referensi-referensi lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data melalui pengamatan langsung (observasi), wawancara kepada para informan (interview) dan pengambilan gambar kondisi di lapangan (dokumentasi).

Aktivitas dalam analisis data dilakukan melalui a). editing data yaitu Proses pengolahan data mentah yang diperoleh pada saat melakukan penelitian. Data direduksi, dirangkum dan dipilih sesuai permasalahan yang diteliti. b). Klasifikasi data adalah penggolongan data yang bersifat umum guna memperoleh gambaran yang jelas dan kesimpulan yang tepat, c). Interpretasi data adalah data yang telah dimasukkan ke dalam tabel kemudian dicari makna atau artinya yang lebih luas dari data dan diolah dengan menghubungkan pada empat pengetahuan serta hasil penemuan yang ada, d). Menyimpulkan Data adalah data yang telah diinterpretasi kemudian disimpulkan dengan melihat hasil wawancara dan hasil penemuan data yang ada sesuai dengan kondisi yang terjadi di lokasi penelitian.

Penelitian ini adalah penelitian Kualitatif, yakni suatu jenis penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status atau gejala yang ada di lokasi penelitian. Menurut kendala apa adanya pada saat penelitian dilakukan (Arikunto, 2002:309). Penelitian yang dimaksud tidak hanya terbatas pada pengumpulan data tetapi juga meliputi analisis dan interpretasi tentang arti data tersebut. selain itu semua data yang

dikumpulkan kemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang diteliti. Satori dan Kamariah (2012:16) mendefenisikan penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang mengungkap situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata teknik pengumpulan data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui penilaian dari imforman terhadap implementasi program dana bantuan operasional sekolah(BOS) pada SMA Negeri 1 Pasangkayu lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Mamuju Utara propinsi Sulawesi Barat peneliti telah melakukan waancara mendalam yang terdiri empat variabel, yaitu pertama: Komunikasi (Commuucation), Sumberdaya (reseuces), Sikap, (disposition atau (attitudes), dan Struktur Birokrasi, (bureucratic structure) berdasarkan dengan model implementasi kebijakan Edward III (Leo Agustino 2006; 150)

Implementasi Program Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA Negeri 1 Pasangkayu dalam lingkup Dinas Pendidikan kebudayaan, Pemuda dan Olahraga kabupaten Mamuju Utara dengan melihat empat variabel tersebut diatas dengan melakukan wawancara melibatkan informan yang dianggap mengetahui dan mengerti masalah-masalah yang diteliti. Informan yang dilibatkan dalam penelitian ini terdiri dari: Unsur dari kepala Dinas pendidikan, Kepala Bidang Pendidikan Menengah, Kepala Sekolah, Komite Sekolah, Siswa yang menerima dampak keberadaan dana Bantuan Operasional Sekolah.

Setiap informan dilakukan identifikasi untuk mengenal lebih dekat masing-masing informan untuk memahami setiap karakteristik informan, sehingga informasi yang diperoleh bersifat optimal sesuai dengan tingkat kebutuhan peneliti. Peneliti lebih mengfokuskan pada implementasi

program dana bantuan operasional sekolah (BOS) pada SMA Negeri 1 Pasangkayu kabupaten Mamuju Utara Propinsi Sulawesi Barat.

Komunikasi

Untuk mengetahui apakah program dana bantuan operasional sekolah (BOS) pada SMA Negeri 1 Pasangkayu kabupaten Mamuju Utara Propinsi Sulawesi Barat sudah terkomunikasikan, atau belum dapat dilihat dibawa ini, yang dikutip dari pendapat informan. Dalam hal ini juga hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mamuju Utara Provinsi Sulawesi Barat Bapak H.M. Yunus Alsam, Pd.I M.Si mengatakan bahwa :

“Kami dari Dinas pendidikan, kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju Utara sudah sesuai dengan standar operasional pelaksanaan, akan tetapi pada saat penyaluran dana bantuan, biasanya dari sekolah terkadang tidak ada penyampaian atau laporan secara tertulis , dari sekolah penerima bantuan, seharusnya memberikan konfirmasi kepada kami, sehingga proses penyaluran berjalan dengan semestinya. (pada tanggal 26 Oktober 2015 Jam 09.30 wita).

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa peran Dinas Pendidikan dan kepala sekolah dan komite sekolah dalam penyaluran dan pengelolaan dana BOS juga menjadi unsur implementor program Bantuan Operasional Sekolah ini dari segi komunikasi belum maksimal. Dengan adanya peran kepala sekolah yang begitu penting. Peran kepala sekolah tersebut diantaranya mengatur alokasi pembiayaan untuk operasional sekolah. Aspek mendasar dari manajemen adalah pembiayaan dimana pembiayaan ini dapat disebut sebagai fungsi penganggaran. Kepala sekolah harus melakukan perencanaan keuangan untuk rencana kegiatan atas sepengetahuan dan keterlibatan komite sekolah sebagai wujud keterbukaan pelayanan pendidikan.

Dalam hal ini juga hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pendidikan Menengah dengan bapak Hainur, L S.Pd.Ing pada Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju Utara, mengatakan bahwa:

“Kalau bicara masalah penyaluran dana BOS di kalangan SMA Negeri 1 Pasangkayu, kami dari Bidang Menengah sudah semaksimal mungkin mengenai penyaluran Bantuan Dana sekolah, akan tetapi biasanya kami juga mengalami kendala masalah administrasi sebagai laporan per/semester mestinya ada di bidang dikmenjurti, tapi kenyataannya tidak seperti itu. itu artinya komunikasi yang tidak jalan” (pada tanggal 23 Oktober 2015 Jam 11.15 wita).

Ini juga dibenarkan oleh orang siswa H.Mahdi Jasin ketika titanya tentang dana sosialisasi dana bantuan operasional sekolah *“Penyaluran Program dana bantuan sekolah disekolah kami sudah terlaksana, akan tetapi biasa kami juga kurangnya informasi atau komunikasi mengenai besaran jumlah bantuan yang diterima pada kami, kami juga sudah memasukan rincian apa-apa yang akan di bantu dalam sekolah kami maupun anak sekolah didik kami yang kurang mampu tetapi berprestasi dalam pendidikan. Akan tetapi biasa kami menemukan kendala keterlambatan distribusi saja dalam penyaluran” (pada tanggal 26 Oktober 2015 Jam 09.00 wita).*

Disimpulkan bahwa peran Dinas Pendidikan dan kepala sekolah dan komite sekolah dalam penyaluran dan pengelolaan dana BOS juga menjadi unsur implementor program Bantuan Operasional Sekolah ini dari segi komunikasi tidak maksimal. Dengan adanya peran kepala sekolah yang begitu penting. Peran kepala sekolah tersebut diantaranya mengatur alokasi pembiayaan untuk operasional sekolah. Aspek mendasar dari manajemen adalah pembiayaan dimana pembiayaan ini dapat disebut sebagai fungsi penganggaran. Kepala sekolah harus melakukan perencanaan keuangan untuk

rencana kegiatan atas sepengetahuan dan keterlibatan komite sekolah sebagai wujud keterbukaan pelayanan pendidikan tetapi ini tidak dilakukan.

Sumberdaya

Untuk mengetahui Implementasi Program Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA Negeri 1 Pasangkayu dalam lingkup Dinas Pendidikan kebudayaan, Pemuda dan Olahraga kabupaten Mamuju Utara dari aspek sumberdaya dapat dilihat dibawah ini, yang dikutip dari informan yang bernama H.Mahdi Jasin yang mewakili orangtua siswa. SMA Negeri 1 Pasangkayu kabupaten Mamuju Utara Kondisi obyektif yang didasarkan pada hasil observasi peneliti dilapangan menunjukkan bahwa penyaluran dana bantuan oprasional sekolah tersebut masih dihadapkan pada sistem pengelolaan yang belum efektif dan efisien serta kualitas sumber daya manusia (staf) yang profesional belum memadai, sehingga berakibat banyaknya keluhan dan pengaduan dari dari pihak sekolah maupun dari komite sekolah yang menerima bantuan dana sekolah, baik secara langsung maupun melalui media masa seperti: prosedur yang berbelit-belit, tidak ada kepastian jangka waktu penyaluran dana bantuan sekolah, persyaratan yang tidak transparan, yang membuat para pemohon bantuan dana sekolah harus kerja ekstra untuk menunggu kapan bantuan tersebut diberikan kepada pemohon sekolah yang menerima bantuan sekolah.

Adapun hasil wawancara orang tua penerima bantuan yang mewakili orang tua siswa dengan Bapak H.Mahdi Jasin yang mengatakan bahwa:

“kalau ditanya mengenai sumber daya pada SMA Negeri 1 Pasangkayu, sy kurang tau mengenai itu, dikarenakan yang saya tau mereka pasti paham mengenai dana BOS tersebut, dikarenakan mereka punya pekerjaan mengurus hal tersebut, kalau kami sebagai orang tua siswa, Cuma menerima bantuan dari pemerintah agar tidak

membeda-bedakan anatar siswa yang satu dengn yang lainnya itu terbukti karna di SMA Negeri 1 Pasangkayu tidak ada lgi pungutan dana dalam bentuk apapun. (hasil pada tanggal 26 Oktober 2015 Jam 11.15 wita.

Hal ini juga senada dengan hasil wawancara dari Komite sekolah dengan Bapak H.Sawal Tani, S. Pd.M.Si yang mengatakan bahwa :

“Aparat Guru dan pegawai SMA negeri 1 Pasangkayu yang mengelola dana bantuan operasinal sekolah cukup propesional dalam hal mengelolah dana bantuan operasional sekolah baik dan berkualitas karena tugas masing-masing bidang jelas dan tepat dalam pemamfaatan dana operasional sekolah” (hasil wawancara pada tanggal, 26 Okotber 2015 dan Jam 09.54 wita.)

Sehingga menimbulkan citra yang kurang baik. Keluhan pemohon bantuan dana sekolah tersebut menunjukkan bahwa Sumber daya yang tersedia, baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya materil dalam pelaksanaan kebijakan penyaluran bantuan dana sekolah, belum memenuhi keadaan yang semestinya dan ideal. Tuntutan peningkatan dan pengembangan sumberdaya manusia yang berkualitas sebagai modal dasar dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi pada satuan kerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Mamuju Utara. Sehingga penyelenggaraan program dan kegiatan sampai pada tahun 2015 Dinas Pendidikan kabupaten Mamuju Utara SMA Negeri 1 Pasangkayu

Disposisi

Untuk mengetahui Implementasi Program Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA Negeri 1 Pasangkayu dalam lingkup Dinas Pendidikan kebudayaan, Pemuda dan Olahraga kabupaten Mamuju Utara dari aspek disposisi/sikap pelaksana dapat dilihat dibawah ini, yang dikutip dari Hal tersebut dapat dicermati hasil wawancara dari beberapa Orang siswa penerima bantuan

operasional sekolah dengan Ni Wayang Yuni Darmayanti, sekretaris osis SMA Negeri 1 Pasangkayu yang mengatakan bahwa:

“kalau ditanyakan masalah pelayanan dan sikap , kami sering memasukan berkas proposal bantuan dana operasional sekolah kepada kepala sekolah seperti kegiatan osis , kepala sekolah sudah disposisi proposal kami, untuk d cairkan dananya lewat bendahara akan tetapi pas kami memberikan disposisi tersebut, kami malah dipersulit memasukan hasil disposisi proposal kami, malah disuruh datang minggu depan untuk mengecek proposal kami, dan kami pun sebenarnya membutuhkan bantuan tersebut dengan cepat dikarenakan bantuan tersebut untuk membantu apa yang akan dikerjakan dan juga demi memajukan sumber daya manusia. (hasil wawancara pada tanggal 23 Oktober 2015 dan jam 08.20 wita)

Begitu juga hasil wawancara dengan siswa penerima bantuan BOS dengan I Wayan Budiarsa ketua MPK SMA Negeri 1 Pasangkayu yang mengatakan bahwa:

“kalau dilihat dari tanggungjawab yang kami lihat pada sekolah sudah jelas, isinya biasa disalurkan dan dibantu, akan tetapi biasanya lambat dalam penyaluran, tidak tau kenapa, pada saat kami konfirmasi ke bendahara pengelola dana bantuan tersebut , kami hanya dilayani pegawai honorer saja, mereka pun menjawab, nanti datang lagi dek..karena yang mengurus bantuan tersebut lagi ada keluar, kami pun bolak-balik ke kelas untuk menanyakan dan bantuan tersebut” pada Tanggal 23 Oktober 2015 dan Jam 09.38 wita)

Sedangkan hasil wawancara dengan Komite Sekolah Bapak. H. Sawal Tan, S Pd.M Pd , yang mengatakan bahwa :

“kalau di tanya tentang sikap dan pelayanan dalam pemamfaatan dana BOS tersebut masih ada keluhan dari siswa, meyampaikan kepada ketua komite bahwa pada saat mengajukan ke Bendahara SMA Negeri 1 Pasangkayu maupun kepada salah satu staf

yang mengurus tentang bantuan tersebut, sering kali menghilangkan berkas kami, kami juga tidak tau kenapa bisa hilang berkas kami, apakah mereka juga pengen uang pelicin biar diproses dengan cepat? Padahal bantuan tersebut ialah untuk memperbaiki sekolah” (hasil wawancara pada tanggal 24 Oktober 2015 dan jam 09.54 wita)

Berdasarkan wawancara diatas seharusnya di era desentralisasi ini pemerintah tidak cukup hanya memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang bersifat otonom, melainkan juga perlu diikuti dengan pembenahan sikap pegawai sebagai pelaksana kebijakan untuk mempunyai inovasi, kreatifitas dan profesionalitas dalam bekerja. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya reformasi birokrasi dan reformasi pegawai dalam mengelola pemerintahan daerah sesuai visi misi bapak bupati Mamuju Utara.

Hal ini menunjukkan bahwa staf selaku pelaksana institusi pemerintah, khususnya organisasi SMA Negeri 1 Pasangkayu, maka dalam hal ini dituntut untuk memberikan pelayanan terbaik kepada siswa yang merasakan dampak langsung adanya bantuan pemerintah, dimana para pegawai harus bersikap adil, dan tidak diskriminatif, misalnya tidak pandang suku, agama, kedaerahan atau ras serta status sosial, akan tetapi impersonal dan objektif dalam memberikan pelayanan. Perilaku birokrasi yang transparansi dan akuntabilitas adalah merupakan suatu bentuk perilaku dari aparat/pegawai agar bertindak tidak diskriminatif sehingga berpengaruh terhadap pemberian kualitas pelayanan dan sekaligus menciptakan *equilibrium* antara hak dan kewajiban para warga dengan pihak pemberi layanan. Perilaku birokrasi ini dapat ditemukan melalui pembaharuan dan pembentukan birokrasi yang efektif dan efisien.

Weber (dalam Keban, 2008:244), yang mengemukakan bahwa ketika masyarakat

berkembang semakin kompleks maka diperlukan suatu institusi yang rasional yaitu birokrasi. Dalam birokrasi ini diatur perilaku yang tidak saja produktif tetapi juga loyal terhadap pimpinan dan organisasi. Perilaku yang impersonal dan saklek harus diterapkan. Hubungan kekeluargaan, kelompok sosial tidak mendapat tempat untuk dipertimbangkan dalam birokrasi. Oleh karena itu, para anggota organisasi harus ditempatkan berdasarkan kemampuan yang dimiliki, dikembangkan dan dituntun dengan peraturan yang jelas dalam menjalankan tugasnya. Birokrasi tersebut kemudian diperkenalkan di Indonesia pada masa orde baru namun dalam perkembangan selanjutnya konsep tersebut dimanipulasi secara politis untuk mempertahankan kekuasaan dimana birokrasi diposisikan sebagai suatu kerajaan pejabat yang rajanya adalah pejabat itu sendiri. dan hubungan primordial sangat kental mempengaruhi sikap pelaksana dalam implementasi kebijakan. Hal tersebut menjadi salah satu sebab mengapa sikap para pelaksana/implementor belum bisa berubah dari kebiasaan yang sentralistik dengan budaya mohon petunjuk dari atasan

Struktur Birokrasi

Hal ini juga hasil penelitian dan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju Utara, Bapak H.M. Yunus Alsam, S Pd, M.Si yang mengatakan: *“Mengenai kejelasan dan keterangan organisasi merupakan hal yang penting dan tepat agar memiliki keterpaduan yang jelas dalam setiap organisasi, Mengenai standar operating prosedur dalam penyaluran dana BOS itu tidak ada karena dana tersebut membantu pertumbuhan pendidikan agar anak-anak semua dapat belajar minimal tamat SMA. Dan Rentang kendali antar pucuk pimpinan dengan bawahan dalam struktur organisasi pelaksanaan dana BOS di SMA Negeri 1 Pasangkayu, itu merupakan*

hal yang tidak terpisahkan dan ini sama-sama jalan dalam mengatur jalannya penggunaan dana BOS, karena ini dana merupakan amanah pemerintah pusat dalam hal ini melalui Kementrian Pendidikan Menengah melalui dapodikmen. (hasil wawancara pada tanggal 27 Oktober 2015 dan jam 09.19 wita)

Hal ini sejalan dengan teori Hasibuan (2005:34) mengemukakan bahwa struktur organisasi (birokrasi) adalah suatu gambaran tentang tipe organisasi, pendepartemenan organisasi, kedudukan dan jenis wewenang pejabat, bidang dan hubungan pekerjaan, garis perintah dan tanggung jawab, rentang kendali dan sistem pimpinan organisasi, sehingga dapat dinyatakan bahwa struktur organisasi adalah kerangka yang mewujudkan pola dari hubungan-hubungan di antara bidang-bidang kerja, maupun orang-orang yang menunjukkan kedudukan dan peranan masing-masing dalam kebutuhan kerjasama. Struktur adalah kerangka dasar dari hubungan formal yang telah disusun. Maksud dari struktur itu, untuk membantu dalam mengatur dan mengarahkan usaha-usaha yang dilakukan dalam organisasi, sehingga usaha-usaha itu terkordinir dan konsisten dengan sasaran organisasi. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan suatu organisasi yang baik, efektif dan sehat dan efisien, maka dalam organisasi tersebut perlu diterapkan beberapa asas atau prinsip organisasi karena organisasi yang sehat, efektif, efisien adalah organisasi yang dalam pelaksanaan tugas-tugasnya mendasari diri pada asas-asas organisasi tertentu. Asas-asas organisasi terdiri dari rumusan tujuan dengan jelas, pembagian pekerjaan, pelimpahan wewenang, koordinasi, rentang kendali dan kesatuan komando. Struktur organisasi adalah suatu sistem formal dari aturan dan tugas serta hubungan otoritas yang mengawasi bagaimana anggota organisasi bekerjasama dan menggunakan sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi. Dapat dikatakan bahwa perhatian sebuah organisasi

terhadap struktur organisasi dapat membantu organisasi untuk mempersatukan, meningkatkan kemampuan organisasi untuk mengatur dan mengendalikan keanekaragaman, menghasilkan barang dan jasa, kualitas organisasi, mengintegrasikan dan memotivasi fungsi-fungsi dan anggotanya, membawa organisasi ke arah yang tentunya lebih baik

Selanjutnya Chung & Megginson (dalam Keban, 2008:135) mengemukakan bahwa Desain organisasi adalah suatu proses yang berkenaan dengan bagaimana aktivitas-aktivitas organisasi distrukturkan atau dituangkan dalam suatu bentuk struktur, dengan tujuan untuk membantu manajer dapat mencapai tujuan secara efisien dan efektif. Hal yang dikembangkan dalam desain organisasi adalah hirarki dari tujuan organisasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala SMA Negeri 1 Pasangkayu bapak Arman, S.Pd mengatakan bahwa:

“Kalau di tanya mengenai struktur organisasi di SMA Negeri 1 Pasangkayu kepala sekolah di bantu oleh para wakasek dan guru-guru dalam mengelola proses belajar mengajar dengan berpedoman pada visi Misi sekolah dalam hal mencerdaskan kehidupan anak-anak bangsa dan alhamdulillah dengan adanya bantuan pemerintah melalui dana bantuan operasional sekolah pihak tidak lagi membebankan biaya kepada orangtua siswa cuma memang yang menjadi kendala sering terlambat dalam pencirannya karena berproses mulai dari tingkat pusat, propinsi, kabupaten baru masuk ke sekolah secara administrasi”. (pada tanggal 23 Oktober 2015 jam 09.30 wita)

Berdasarkan wawancara tersebut diatas menunjukkan bahwa struktur organisasi, tujuan, visi dan misi organisasi yang dibantu oleh dana bantuan operasional sekolah SMA Negeri 1 Pasangkayu melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Mamuju Utara belum dipahami oleh seluruh implementor atau pelaksana kebijakan. Organisasi modern

sekarang ini tidak lagi menempatkan struktur organisasi secara kaku dalam mengatur dan menempatkan orang dalam organisasi. Karena pengaruh kemajuan teknologi dan informasi yang berkembang begitu pesat tidak memungkinkan struktur menjadikan anggota organisasi menjadi terkungkung. Oleh karena itu perlu di desain suatu struktur organisasi yang ramping dan terbuka layaknya sebagai suatu sistem organisme sehingga lebih fleksibel dan efisien dalam mencapai tujuan organisasi. Sehubungan dalam konteks tersebut, maka implementasi kebijakan penyaluran Dana Bantuan Sekolah (BOS) perlu dipertimbangkan dengan suatu desain struktur organisasi yang fleksibel, efisien dan efektif dalam mengimplementasi suatu kebijakan untuk mewujudkan adanya suatu pelayanan yang berkualitas.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap fokus permasalahan dalam penelitian ini ,maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Aspek komunikasi dalam pelaksanaan implementasi program mekanisme dan penyaluran dana bantuan operasional sekolah belum terlaksana dengan baik
- 2) Aspek sumberdaya dalam pelaksanaan implementasi program dana bantuan operasional sekolah SMA Negeri 1 Pasangkayu kabupaten Mamuju Utara sudah baik,
- 3) Aspek disposisi dalam pelaksanaan implementasi program dana bantuan operasional sekolah SMA Negeri 1 Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara belum terlaksana dengan baik
- 4). Aspek Struktur Birokrasi, dalam pelaksanaan implementasi program dana bantuan operasional sekolah SMA Negeri 1 Pasangkayu kabupaten Mamuju Utara belum sesuai SOP yang ada.

Rekomendasi :

- 1) Perlunya keterlibatan semua stakeholder pendidikan dalam mengawasi proses penyaluran bantuan operasional sekolah pada SMA Negeri 1 Pasangkayu kabupaten Mamuju Utara untuk memastikan bahwa program tersebut tersosialisasikan dengan baik.
- 2) Perlunya penguatan motivasi pegawai/staf dalam pelaksanaan penyaluran dana BOS SMA Negeri 1 Pasangkayu.
- 3) Perlunya koordinasi yang lebih intens untuk supervisi dan pengawasan terhadap proses mekanisme penyaluran dana bantuan operasional sekolah SMA Negeri 1 Pasangkayu kabupaten Mamuju Utara Propinsi Sulawesi Barat agar program bantuan pemerintah tepat sasaran..

tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertanggungjawaban belanja bantuan operasional sekolah,,

Peraturan Pemerintah 48 Tahun 2008 *tentang* pendanaan pendidikan

Riant Nugroho. 2003. *Kebijakan Publik. Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Penerbit PT. Elex Media Komputindo. Jakarta

Satori dan Kamariah 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Alfabeta Bandung

Sugiono, 2005. *Metode Penelitian Administrasi*. Alfabeta, Bandung.

Sugiyono, 2010. *Metode Penelitian Bisnis*. Cetakan ke-15. Penerbit Alfabeta, Bandung

Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003, 2009 Diterbitkan oleh Fokus Media

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Bapak Dr. Moh Irfan Mufti, M. Si . dan Bapak Dr.Nawawi Natsir, M.Si yang telah memberikan masukan dan saran atas penulisan artikel ini.

DAFTAR RUJUKAN

Arikunto. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Penerbit Rhineka Cipta, Jakarta

Leo Agustino 2006, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* Penerbit CV Alfabeta. Bandung

Peraturan Daerah Kab.Mamuju Utara Nomor 05 Tahun 2005 *tentang* Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Utara

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2014 *tentang* Petunjuk teknis penggunaan dan pertanggung jawaban keuangan dana BOS tahun anggaran 2014

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 tahun 2013